

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KRAMATWATU**



**TAHUN 2025
JALAN TASIK KARDI NOMOR 17
KRAMATWATU SERANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-NYA sehingga Rencana Kerja (Renja) 2025 ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari para Kasi dan Kasubag termasuk pengelola program dan PPTK yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dalam penyusunan renja ini sehingga bisa berdampak kerja dan kinerja dalam pembangunan pemerintah Kabupaten Serang.

Pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana paradigma pembangunan hampir selalu di kaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Dan harapan kami, semoga Rencana Kerja ini menjadikan acuan untuk selalu meningkatkan program dan kegiatan di Kecamatan Kramatwatu khususnya, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Serang.

Serang, 3 Juli 2024

CAMAT KRAMATWATU



SRI RAHAYU BASUKIWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197004102005022001

RENCANA KERJA KECAMATAN KRAMATWATU

Sistematika penyusunan Rencana Kerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	24
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
 BAB V PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kramatwatu, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

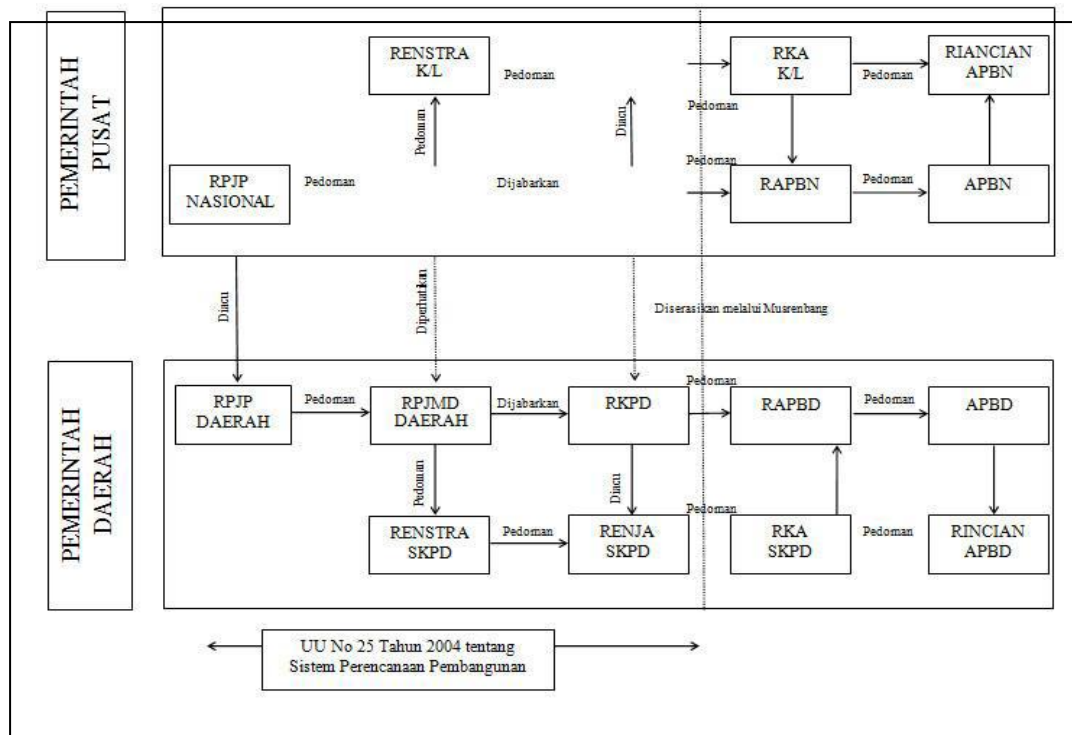
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kramatwatu serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Kramatwatu secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat dokumen renja memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dan Renja Perangkat Daerah Dalam Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah adalah RKPD yang berhubungan dengan perangkat daerah terkait.

Kecamatan Kramatwatu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Kramatwatu setiap tahun.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 (selanjutnya disebut renja Kecamatan Kramatwatu) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
5. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21 ,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5859 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten serang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten serang tahun 2016-2023;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di kabupaten serang;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas pada kecamatan di Kabupaten Serang .

21. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025;
22. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Kramatwatu;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2025, sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen rancangan kerja (RENJA) Kecamatan Kramatwatu, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang memuat tentang pengertian, ringkas tentang Renja Kecamatan Kramatwatu, Proses Penyusunan Renja Kecamatan Kramatwatu Keterkaitan antara Renja Kecamatan Kramatwatu dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD;

1.2. Landasan Hukum Menguraikan tentang ringkasan yang menjadi landasan hukum di dalam dokumen RKPD Tahun 2025, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Kramatwatu

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok penyusunan Renja Kecamatan Kramatwatu

Terkait dengan Pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRAMATWATU TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kramatwatu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kramatwatu

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kramatwatu

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KRAMATWATU

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kramatwatu.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kramatwatu Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
- 3.3 Program dan Kegiatan pada bagian ini di susun atas berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KRAMATWATU

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KRAMATWATU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kramatwatu

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kramatwatu tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Kramatwatu sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kramatwatu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kramatwatu tahun - tahun sebelumnya.

3

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kramatwatu Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Kramatwatu, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kramatwatu dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Kramatwatu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kramatwatu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Kramatwatu menurut DPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.575.400.000,-. Sedangkan Alokasi Anggaran 2024 yang diterima Kantor Kecamatan Kramatwatu menurut DPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.964.693.920,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Kramatwatu s/d Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRAMATWATU SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PERIODE 2021-2026 KABUPATEN SERANG

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Kramatwatu Periode 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Kramatwatu Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	URUSAN KEWILAYAHAN									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	91,48	12 bulan	36 bulan	60
1.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	92,88	12 bulan	36 bulan	60
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	92,88	12 bulan	36 bulan	60
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	66,37	12 bulan	36 bulan	60

1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	36 bulan	60
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	93,43		24 bulan	66,66
1.2.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	81,65	12 bulan	36 bulan	60
1.2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	62,93	12 bulan	36 bulan	60
1.2.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	81,60	12 bulan	36 bulan	60
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	63,22	12 bulan	36 bulan	60
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	89,22	12 bulan	36 bulan	60
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	79,38	12 bulan	36 bulan	60
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	91,67	12 bulan	36 bulan	60
1.4	Pemeliharaan Barang Milik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	62,62	12 bulan	36 bulan	60

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	59,90	12 bulan	36 bulan	60
1.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan Lainnya yang Dipelihara	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	73,69	12 bulan	36 bulan	100
1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	36 bulan	60
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	79,91	12 bulan	36 bulan	60
2.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	82,82	12 bulan	36 bulan	60
2.1.2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 bulan	12 bulan	12 bulan		82,82	12 bulan	24 bulan	40
2.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	79,85	12 bulan	36 bulan	60
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	79,85	12 bulan	36 bulan	60

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	77,15	12 bulan	36 bulan	60
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	77,15	12 bulan	36 bulan	60
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	94,78	1 kegiatan	3 kegiatan	60
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	74,98	12 bulan	36 bulan	60
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	97,17	1 kegiatan	3 kegiatan	60
4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	97,17	1 kegiatan	3 kegiatan	60
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kramatwatu	Terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	97,17	1 kegiatan	3 kegiatan	60
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	95,87	12 bulan	36 bulan	60
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	95,87	12 bulan	36 bulan	60
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	90,73	1 kegiatan	3 kegiatan	60

	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	96,26	12 bulan	36 bulan	60
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	57,12	12 bulan	36 bulan	60
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	57,12	12 bulan	36 bulan	60
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	57,12	12 bulan	36 bulan	60
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 desa	3 desa	3 desa	3 desa	0		6 desa	100

1.4

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kramatwatu untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Kramatwatu;
4. Perencanaan kegiatan 2025 belum dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Kramatwatu adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Kramatwatu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Kramatwatu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Kramatwatu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kramatwatu.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi

program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Kramatwatu sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
4. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kramatwatu.

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Kramatwatu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kramatwatu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kramatwatu

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra Kecamatan Kramatwatu				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa
		STANDAR NASIONAL		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Kecamatan			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Persentase Kehadiran Pegawai dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Jumlah Pelanggaran dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
4	Persentase Capaian Koordinasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Instansi Vertikal dan Desa			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Jumlah Desa yang Melaksanakan Swadaya Gotong Royong dalam Pembangunan			15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	
6	Persentase Kualitas Pelayanan Publik yang Menjadi Kewenangan Kecamatan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kramatwatu adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kramatwatu dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Kramatwatu sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Kramatwatu sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kramatwatu.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kramatwatu hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kramatwatu sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kramatwatu terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kramatwatu.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Weard – Hawaerd) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Kramatwatu terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Kramatwatu mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.

- c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024 Kecamatan Kramatwatu, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Kramatwatu dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Kramatwatu melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

e. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .**

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Kramatwatu melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Kramatwatu dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kramatwatu

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEWILAYAHAN				6,836,647,944	URUSAN KEWILAYAHAN				6,873,647,944	APBD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		5,115,827,944	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		5,115,827,944	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,687,536,040	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,687,536,040	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kramatwatu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	4,687,536,040	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kramatwatu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	4,687,536,040	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		118,405,843,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		118,405,843,00	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.320.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.320.000,00	APBD

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000,00	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.000.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.000.000,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3.005.843,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3.005.843,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000,00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah		11.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah		11.000.000,00	APBD
	Pengadaan Mebel	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	11.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kec.Kramatwatu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	11.000.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		204,652,728	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		204,652,728	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.186.560,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.186.560,00	APBD

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167.466.168,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167.466.168,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		94,233,333	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		94,233,333	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Kramatwatu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	10.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Kramatwatu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	10.900.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Kramatwatu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	83.333.333,00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Kramatwatu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	83.333.333,00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		CAKUPAN PENYELENGGARAA N KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		1.247.900.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		CAKUPAN PENYELENGGAR AAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		1.247.900.000	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		27.900.000,00	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		27.900.000,00	APBD

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Kram atwatu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	27.900.000,00	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Kram atwatu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	27.900.000,00	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.220.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.220.000.000	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Kram atwatu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.220.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Kram atwatu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.220.000.000	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN		208.409.000,00	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAA N DESA/ KELURAHAN		208,409,000,00	APBD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		180.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		180.000.000,00	APBD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Kram atwatu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Kram atwatu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	20.000.000,00	APBD

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	160.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Kramatwatu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	160.000.000,00	APBD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Kramatwatu	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 laporan	50.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Kramatwatu	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 laporan	50.000.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		20.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		20.000.000,00	APBD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		20.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		20.000.000,00	APBD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kramatwatu	Kec. Kramatwatu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	20.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kramatwatu	Kec. Kramatwatu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	20.000.000,00	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan		110.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan		110.000.000,00	APBD

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		110.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		110.000.000,00	APBD
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Kramatwatu	Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 orang	10.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Kramatwatu	Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 orang	10.000.000,00	APBD
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Kramatwatu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	55 orang	100.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Kramatwatu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	55 orang	100.000.000,00	APBD

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan pemerintahan desa yang dibina		113.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan pemerintahan desa yang dibina		113.000.000,00	APBD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		113.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		150.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Kramatwatu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Kramatwatu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	50.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Kramatwatu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 dokumen	63.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Kramatwatu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 dokumen	100.000.000,00	APBD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

Pada forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan ,selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2024 kemudian disusun menjadi Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025.

Untuk tahun ini belum ada usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Bidang Urusan/ Usulan Dari/ Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	2	7	8	9	10
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KRAMATWATU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2016 – 2021 maka Kecamatan Kramatwatu menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik “.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kramatwatu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kramatwatu selama 5 (lima) tahun anggaran sampai tahun 2025 adalah “*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi*”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Kramatwatu yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2025, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kramatwatu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2023	2025	2025	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Serang

“ Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis “

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional “

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Kecamatan Kramatwatu merumuskan 6 Program 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kramatwatu Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain

		Dilimpahkan kepada Camat	yang Dilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KRAMATWATU

Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Kramatwatu untuk Tahun 2025 sebesar Rp.**6.996.282.680,-** secara rinci Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	7					URUSAN KEWILAYAHAN				6.996.282.680,00		7.342.522.6000,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			5.148.095.532,00		5.301.622.600,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.700.800.000,00		4.687.536.040,00
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kramatwatu	35 orang	4.700.800.000,00	35 orang	4.687.536.040,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			222.078.408,00		275.400.000,00
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	1 paket	2.319.800,00	1 paket	2.400.000,00
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	1 paket	13.400.000,00	1 paket	45.000.000,00
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga / Kebersihan yang di sediakan	Kec. Kramatwatu	1 Paket	6.137.000,00	1 Paket	8.000.000,00
	7	01	01	2.06	04	Peyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	1 paket	16.394.000,00	1 paket	15.000.000,00

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	1 paket	6.187.608,,00	1 paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Kramatwatu	12 laporan	177.640.000,00	12 laporan	200.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah			19.910.000,00		15.000.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	30 unit	19.910.000,00	30 unit	15.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			175.718.424,00		187.186.560,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	12 Laporan	36.000.264,00	12 Laporan	37.186.560,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Kramatwatu	12 Laporan	139.718.160,00	12 Laporan	150.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.588.700,00		136.500.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec.Kramatwatu	5 unit	17.088.700,00	6 unit	38.500.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang di pelihara	Kec. Kramatwatu	8 Unit	5.240.000,00	11 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Kramatwatu	1 unit	7.260.000,00	1 unit	90.000.000,00

2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN			1.317.831.848,00		1.477.900.000,00
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.014.000,00		27.900.000,00
	7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Kramatwatu	1 laporan	23.014.000,00	1 laporan	27.900.000,00
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.294.817.848,00		1.450.000.000,00
	7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Kramatwatu	12 laporan	1.294.817.848,00	12 laporan	1.450.000.000,00
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN			184.718.000,00		230.000.000,00
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			134.718.000,00		195.000.000,00
	7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Kramatwatu	1 laporan	19.014.000,00	1 laporan	25.000.000,00
	7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Kramatwatu	4 laporan	115.704.000,00	4 laporan	170.000.000,00
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Kec.Kramatwatu	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	60.000.000,00
	7	01	03	2.03	04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Kramatwatu	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	60.000.000,00

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			9.774.000,00		30.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan			9.774.000,00		30.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kramatwatu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kramatwatu	1 laporan	9.774.000,00	1 laporan	30.000.000,00
5	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan			115.915.000,00		128.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			115.915.000,00		128.000.000,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Kec.Kramatwatu	55 orang	14.908.000,00	55 orang	13.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Kramatwatu	55 orang	101.007.000,00	55 orang	115.000.000,00

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pemerintahan desa yang dibina			219.948.300,00		150.000.000,00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			219.948.300,00		150.000.000,00
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Kramatwatu	4 dokumen	76.392.000,00	4 dokumen	100.000.000,00
	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Kramatwatu	4 dokumen	143.556.30,00	4 dokumen	50.000.000,00

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Kramatwatu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Kramatwatu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Kramatwatu pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 6 program 12 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu tahun 2025 merupakan dokumen Rancangan Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Kramatwatu tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Kramatwatu tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Serang, 3 Juli 2024

CAMAT KRAMATWATU



SRI RAHAYU BASUKIWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197004102005022001

